

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Program Kampung Keluarga Berencana merupakan sebuah program dilaksanakan oleh Kelompok Kerja, kelompok kerja tersebut juga dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan pada pelaksanaan ini. Program Kampung Keluarga Berencana ini dibuat oleh BKKBN, program ini dibuat pada tahun 2016. program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung/desa melalui beberapa kategori kegiatan antara lain BKR, BKB, BKL UPPKS dan Pik Remaja di muat perkategori dengan kegiatan yang disusun.

Manajemen Program Kampung KB di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang telah menjalankan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari proses manajemen yang dikemukakan oleh John F. Mee yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengawasan. Namun masih terdapat permasalahan dan kurangan dalam pelaksanaan proses Manajemen Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

Dalam hal perencanaan program Kampung KB ini ada melibatkan pihak pemerintah Kota Padang, selain juga ada pihak pembuat program itu sendiri yaitu BKKBN. Aktor dari pelaksanaan program juga ditentukan yaitu dari tingkat kelurahan atau kampung yang ditunjuk. Nantinya. Pada pelaksanaan program dibentuk kelompok kerja guna menjalankan kegiatan-

kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendanaan pada program Kampung KB juga terbatas, hal ini menjadi factor penghambat tersendiri bagi kelompok kerja dalam pelaksanaan.

Pengorganisasian dalam program Kampung KB pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh kelompok kerja, kelompok kerja ini dibentuk oleh pihak kelurahan. Ketua rw otomatis menjadi ketua kelompok kerja yang ditunjuk oleh pihak kelurahan. Pada pelaksanaan, kelompok kerja di kelompokkan dari beberapa kategori kegiatan yaitu BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja. Dari masing-masing kategori diatas memiliki kegiatan, dan kegiatan-kegiatan tersebut nantinya disesuaikan dengan kategori yang sudah ditetapkan. Adapun pendelegasian wewenang program ini terbagi antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat di lihat pada tabel 5.3 disana di jelaskan fungsi masing masing.

Dalam pemberian motivasi, secara langsung tidak dilakukan, hanya diberikan penghargaan juara harapan 3 tingkat nasional. Hal ini juga melalui berbagai proses perlombaan yaitu dari tingkat kota, provinsi dan nasional. Dengan pemberian penghargaan tersebut di harapkan kelompok kerja termotivasi dalam pelaksanaan program Kampung KB. Selain itu dalam hal pemberian hukuman tidak ada, disebabkan pertimbangan yaitu pelaksanaan program ini dilaksanakan secara sukarela, jalan atau tidak nya program dapat diketahui dari ketua kelompok kerja, dikarenakan kelompok kerja memiliki peran sangat penting. Kalau penggerak programnya tidak jalan, maka dapat disimpulkan program tersebut kemungkinan tidak jalan.

Dalam hal pengawasan pada program Kampung Keluarga Berencana pihak Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki juga peran dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilakukan ada berupa observasi atau pengamatan langsung kepada kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk dari pengamatan tersebut ikut terlibat dalam hal

kegiatan yang di lakukan. Selain itu bentuk pengawasan lainnya berupa hasil laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok kerja. pada Tahun 2016 laporan kegiatan melalui tahapan yaitu dari kecamatan, DP3AP2KB dan BKKBN provinsi. Dan pada saat ini dimuat ke dalam situs website yang di buat BKKBN yaitu KampungKBBKKBN.co.id. laporan tersebut dilakukan setiap bulannya. Selain itu dalam pemabatsan wewenang kelompok memiliki SK dalam menjalankan program tersebut. SK tersebut juga menjadi patokan kelompok kerja dalam melaksanakan program Kampung KB.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka peneliti mengusulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan program Kampung KB pemberian hukuman juga di perlukan dalam upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program
2. Perlu adanya petunjuk pembentukan pelaksanaan program guna tidak terjadi hal tumpang tindih dalam pelaksanaan
3. Dalam segi pendanaan, perlu ada dana khusus pada program Kampung Keluarga Berencana ini, agar dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaksana kegiatan
4. Pada penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dan pengayaan bahan pustaka untuk pengembangan ilmu manajemen program Kampung KB di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padangg Utara Kota Padang.

